



Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir Dalam Perspektif Politik Identitas: Konflik Agama dan Nasionalisme di Asia Selatan

Riyanti Prastika¹, Shesaria Nirmala², Tama Nurhaliza³ & Mohammad Riza Widyarsa⁴

^{1,2,3,4,5} Hubungan Internasional Universitas Paramadina

ARTICLE INFO:

Paper Type:

Research Paper

Keywords:

Kashmir, India, Pakistan, Sengketa, Muslim, Konflik

Article History

Received: 6 February 2025

Revised: 6 April 2025

Accepted: 3 June 2025

Available online: 3 July 2025

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

ABSTRACT

India memiliki beberapa wilayah negara bagian salah satu nya ialah wilayah Kashmir yang saat ini masih di persengketakan oleh beberapa negara seperti India, Pakistan dan Tiongkok. Sengketa perbatasan wilayah Kashmir sampai saat ini masih sangat rumit dan belum mendapatkan keputusan yang cukup memuaskan bagi negara-negara yang memperebutkan nya. Bermula di tahun 1947 dimana Inggris meninggalkan wilayah Kashmir kepada India dengan status yang tidak jelas, dipimpin oleh Maharaja Hindu dengan mayoritas penganut Muslim Terbanyak. Konflik ini sudah menjadi sengketa yang berkepanjangan di Asia Selatan yang didasari oleh agama, nasionalisme, dan kepentingan geopolitik. Faktor-faktor tersebut yang menjadi landasan terjadinya Konflik India dan Pakistan hingga menyebabkan peperangan di tahun 1947-1949 ketika Maharaja Kashmir memilih untuk bergabung dengan India, namun keputusan ini tidak diterima oleh Pakistan yang menganggap bahwa Kashmir seharusnya masuk sebagai wilayah Pakistan karena masyarakat Kashmir mayoritas beragama Islam, sedangkan India menegaskan bahwa Kashmir sebagai bagian dari wilayah negara bagiannya yang sah secara hukum.

*Corresponding author: muhammad.riza@paramadina.ac.id

Cite this article as: Prastika, R., et al. (2025). *Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir Dalam Perspektif Politik Identitas: Konflik Agama dan Nasionalisme di Asia Selatan*. Paramadina Journal of Diplomacy & Foreign Policy, 02 (01), 11-24.

<https://journal.paramadina.ac.id/index.php/diplomacyforeignpolicy>

1. Pendahuluan

Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang strategis di benua Asia, terdiri dari delapan negara: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Sebagian besar negara di kawasan ini merupakan bekas jajahan Inggris, termasuk India dan Pakistan, yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1947. Namun, sejak saat itu, hubungan keduanya diwarnai oleh konflik berkepanjangan atas wilayah Kashmir, yang hingga kini belum terselesaikan (Akbar, 2024). Dengan memiliki wilayah yang strategis dan nilai geopolitik yang tinggi, secara geografis wilayah Kashmir

merupakan sebuah wilayah yang dialiri sungai-sungai besar seperti sungai Indus. Keberadaan dari sungai ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian. Dalam bidang militer wilayah Kashmir ini sendiri berada di daerah pegunungan sehingga dapat menjadi wilayah yang strategis bagi pertahanan suatu negara, dan juga berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Afganistan, China, dan Tibet (Rizki & Muquita, 2023). Letak geografis ini membuat India memandang Kashmir sebagai pintu masuk yang berpotensi memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara tetangga di kawasan tersebut karena wilayah Kashmir ini sendiri merupakan sebuah pintu masuk untuk

mempengaruhi negara-negara tersebut (Fajrin, Tamaela, & Siswatiningrum, 2024).

Konflik antara India dan Pakistan atas wilayah Kashmir merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang sangat kompleks di Asia Selatan. Konflik ini bermula dari ketidakjelasan status Kashmir setelah pembagian India oleh Inggris pada tahun 1947, di mana mayoritas penduduk Kashmir beragama Islam, sementara penguasanya saat itu adalah seorang Hindu yang memilih bergabung dengan India. Keputusan ini ditentang oleh Pakistan dan sebagian besar warga Kashmir, memicu ketegangan yang terus berlangsung hingga kini. Seiring waktu, konflik ini berkembang dari sekadar sengketa teritorial menjadi persoalan identitas politik, agama, dan nasionalisme. Bagi Pakistan, Kashmir adalah bagian dari komunitas Muslim yang harus disatukan secara historis dan religius, sementara India memandang Kashmir sebagai bagian integral dari kedaulatannya. Pada saat yang sama, tuntutan sebagian masyarakat Kashmir untuk merdeka semakin memperkeruh konflik ini, yang turut memperburuk hubungan bilateral India dan Pakistan serta memengaruhi stabilitas kawasan Asia Selatan (Alhayyan, 2013; Firmanty, 2010).

Problema Kashmir bermula ketika masyarakat muslim di India membangun negara sendiri yaitu Pakistan. Persoalan muncul terkait dengan wilayah Kashmir yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi pemimpinnya beragama Hindu. Tanggal 15 Agustus 1947, Kashmir sebagai wilayah dari negara Kepangeran (Indian Princely States) diberikan pilihan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk memilih menjadi bagian dari negara India atau Pakistan. Hari Singh sebagai seorang pemimpin Kashmir berpikir untuk tidak bergabung ke kedua negara tersebut dan ingin menciptakan negara baru. Pada 27 Oktober 1947 Hari Singh menyatakan bergabung dengan India tanpa persetujuan penduduknya. Hal ini membuat Pakistan dan penduduk Kashmir yang beragama Islam tidak menerima karena keputusan sepihaknya. Keputusan Hari Singh lah yang akhirnya menempatkan Kashmir sebagai wilayah sengketa yang tak terselesaikan.

Berawal dari konflik identitas yang terjadi di masa lalu hingga saat ini, pemerintah India membuat kebijakan untuk mencabut hak otonomi yang dimiliki Jammu Kashmir pada tahun 2019 yang membuat masyarakat lokal bereaksi

keras dan melakukan protes. Ada beberapa alasan mengapa India mencabut hak otonomi terhadap Jammu dan Kashmir yang utama adalah India menganggap memberikan hak otonomi terhadap Jammu dan Kashmir akan menghambat integrasi penuh wilayah tersebut dalam kesatuan Republik India dan akan menciptakan ketidaksetaraan dan fregmentasi nasional (Putri, 2020). Dengan alasan ini India ingin status Kashmir menjadi sama tanpa hak khusus seperti negara bagian lain di India yang lainnya.

Kedua, pemerintah India menganggap jika hak otonomi tersebut dimanfaatkan oleh segelitir dan pihak-pihak yang menginginkan Kashmir memisahkan diri dengan India. Pencabutan pasal 370 bertujuan untuk menyingkirkan terorisme dan kelompok separatisme yang selama ini mengganggu stabilitas dan keamanan wilayah tersebut. India berargumen bahwa Pakistan menjadikan status khusus tersebut sebagai alat untuk memprovokasi kelompok anti-India di Kashmir (Fauzi, Sari, & Rachmat, 2020).

Ketiga, pasal 370 menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan infrastruktur di wilayah tersebut. Dengan menghapus otonomi khusus pemerintah berharap seluruh penduduk di India dapat memajukan wilayah Kashmir dengan membeli properti dan berinvestasi untuk mempercepat pembangunan, kemajuan wilayah, dan mensejahterakan masyarakat setempat (Putri, 2020). Keempat, partai politik India (BJP) sangat menentang pasal 370, dan sangat mendukung pencabutan hak otonomi tersebut, hal ini pun menjadi langkah nya dalam berpolitik (Ahmad, Palupi, & Syofirman Syofian, 2020). Dengan menjanjikan pencabutan hak otonomi khusus BJP melihat langkah yang penting ini sebagai bentuk untuk memperkuat kedaulatan dan integritas wilayah India juga bentuk ketegasan India bahwa Jammu Kashmir berada dibawah pemerintahan pusat. Namun, kebijakan pencabutan hak khusus ini menjadi kontroversial bagi masyarakat Kashmir yang mayoritas Muslim dan juga Pakistan yang menganggap bahwa India mencabut hak ini secara ilegal serta memperuncing ketegangan yang sudah terjadi selama ini. di sisi lain banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut membuat konflik ini semakin mengundang perhatian ke dunia internasional (Rosdiana, 2020).

Situasi yang seperti ini menunjukkan bahwa konflik di Kashmir tidak hanya sekedar perebutan wilayah tetapi ada konflik untuk menuntut pengakuan identitas dan hak politik masyarakat setempat. Setelah pencabutan pasal 370, India memperketat keamanannya untuk meredam protes, termasuk penahanan tokoh politik lokal, pembatasan komunikasi, dan pemberlakuan lockdown yang berdampak pada perekonomian wilayah tersebut. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan dan ketakutan di kalangan masyarakat Kashmir. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas kekerasan dan terorisme di wilayah tersebut menunjukkan penurunan (Anwar, 2021).

Wilayah Kashmir memiliki nilai strategis tinggi, terutama bagi Pakistan, karena aliran sungai dari wilayah ini menjadi sumber air vital bagi kehidupan dan kebutuhan irigasi di Pakistan. Penguasaan India atas wilayah sumber air ini membatasi kemampuan Pakistan untuk mengontrol aliran air, yang memperburuk ketegangan negara tersebut pada Kashmir (Arsyada, 2023). Ketegangan ini juga mempengaruhi kebijakan Pakistan terkait pengungsi Kashmir, yang diterima sebagai bagian dari strategi politik demografi untuk memperkuat klaim atas wilayah tersebut dan memperluas pengaruh nasional di kawasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang ini, timbul pertanyaan utama: bagaimana politik identitas agama mempengaruhi sengketa perbatasan Kashmir antara India dan Pakistan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran politik identitas agama dalam memperkuat klaim kedaulatan dan mempengaruhi sengketa tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Konflik Kashmir merupakan salah satu sengketa geopolitik paling kompleks dan berkepanjangan di Asia Selatan. Sejak kemerdekaan India dan Pakistan pada tahun 1947, wilayah Kashmir telah menjadi pusat perebutan yang melibatkan konflik teritorial, identitas nasional, agama, dan sejarah kolonial. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut.

Menurut Bose (2003), akar konflik Kashmir dapat ditelusuri dari sejarah panjang pembentukan negara-bangsa India dan Pakistan setelah pembagian India oleh kolonial Inggris. Perbedaan identitas nasional dan agama menjadi pemicu utama: Kashmir sebagai wilayah mayoritas Muslim dikuasai oleh India yang mayoritas Hindu, memunculkan ketegangan antara nasionalisme sekuler India dan aspirasi keagamaan Pakistan. Chatterjee (1993) menambahkan bahwa kolonialisme dan upaya kedua negara dalam membentuk identitas nasional turut memperumit persoalan. Usaha India untuk mengintegrasikan Kashmir sepenuhnya ke dalam kerangka negara dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap identitas lokal masyarakat Kashmir.

Rohmah dan Wulandari (2024) menjelaskan bahwa konflik ini berakar dari perbedaan budaya dan agama, yang menyebabkan pembagian wilayah Kashmir menjadi dua bagian utama: Pakistan atas Kashmir (PoK) dan India atas Kashmir (IoK). Pemerintahan Dogra yang berkuasa di Kashmir antara tahun 1846–1947, sebagaimana dijelaskan oleh Bhat (2019), menjalankan pemerintahan yang bersifat tirani dan menindas mayoritas Muslim. Penindasan ini memicu kebangkitan kesadaran politik di kalangan Muslim Kashmir, yang kemudian berkembang menjadi identitas politik yang kuat.

Dalam konteks evolusi identitas politik, Chowdhary (2015) menyoroti bahwa sejak tahun 1930-an, identitas etno-nasionalis di Kashmir mulai terbentuk, sebagai respons terhadap ketidakadilan historis, termasuk aneksasi oleh Kekaisaran Mughal dan dominasi pemerintahan Dogra. Identitas ini awalnya berfokus pada kesatuan umat Muslim, namun kemudian berkembang menjadi bentuk yang lebih inklusif, walaupun unsur agama tetap menjadi elemen kunci.

Aspek politik identitas ini semakin terlihat dalam kebijakan-kebijakan India di era modern. Resen (2024) menyoroti penghapusan Pasal 370 dan 35A oleh pemerintah India sebagai upaya untuk menghapus otonomi Jammu dan Kashmir. Langkah ini dianggap sebagai bentuk integrasi paksa yang didasarkan pada ideologi Hindutva, yang mengabaikan aspirasi dan identitas Muslim mayoritas di wilayah tersebut.

Konflik ini juga berdampak besar terhadap hak asasi manusia dan kehidupan sosial ekonomi

masyarakat Kashmir. Rizki dan Muquita (2023) mendokumentasikan berbagai pelanggaran HAM seperti penyiksaan, kekerasan, pemerkosaan, dan penghilangan paksa, yang umumnya menargetkan komunitas Muslim. Selain itu, Rohmah dan Wulandari (2024) mencatat dampak jangka panjang berupa trauma kolektif, migrasi massal, dan terhambatnya pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa konflik Kashmir bukan sekadar konflik teritorial, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara sejarah kolonial, nasionalisme, identitas agama, dan kepentingan geopolitik. Identitas politik Muslim di Kashmir, yang berkembang selama pemerintahan Dogra dan terus berkembang hingga kini, merupakan komponen penting dalam dinamika konflik ini. Pemahaman yang mendalam terhadap politik identitas menjadi krusial untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana perspektif politik identitas melihat peran agama dan nasionalisme memengaruhi konflik Kashmir yang masih berlanjut hingga saat ini.

3. Landasan Teori

Untuk memahami sengketa wilayah Kashmir secara komprehensif, tulisan ini menggunakan pendekatan Teori Politik Identitas sebagai teori utama dan dua kerangka teori pendukung yaitu Teori Protracted Social Conflict (PSC) yang dikembangkan oleh Edward Azar (1990), serta Teori Relative Deprivation oleh Ted Robert Gurr (1970), yang dalam perkembangan lanjutannya menekankan aspek non-material seperti pengakuan identitas dan status sosial kelompok minoritas (Gurr, 1993).

A. Teori Politik Identitas

Teori Politik Identitas berfokus pada bagaimana identitas kolektif, seperti etnis, agama, atau budaya, dimobilisasi untuk memperjuangkan kepentingan politik dan sosial kelompok tertentu (Klandermans, 2014). Teori ini berasal dari konsep Social Identity Theory oleh

Tajfel dan Turner (1979), yang menjelaskan bahwa individu mengembangkan rasa solidaritas dan loyalitas terhadap kelompok mereka melalui perbandingan sosial dengan kelompok lain, terutama ketika kelompok mereka merasa terancam atau terdiskriminasi. Dalam isu Kashmir, politik identitas terlihat dalam mobilisasi masyarakat Muslim Kashmir yang merespons penolakan terhadap identitas etno-religius mereka oleh kebijakan negara yang dianggap diskriminatif. Politik identitas dalam konflik Kashmir memperkuat narasi "kami versus mereka" antara masyarakat Muslim Kashmir dan pemerintah India, yang sering kali dipandang sebagai representasi mayoritas Hindu.

Menurut Klandermans (2014), mobilisasi identitas menjadi alat politik ketika kelompok merasa identitas mereka terancam, sehingga mendorong tindakan kolektif seperti protes, gerakan kemerdekaan, atau bahkan kekerasan. Dalam kasus Kashmir, sentimen ini diperkuat oleh kebijakan militerisasi dan pembatasan kebebasan beragama, yang memicu perlawanan berbasis identitas untuk menuntut pengakuan, otonomi, atau bahkan pemisahan diri. Teori Politik Identitas juga menyoroti peran aktor eksternal, seperti organisasi politik atau kelompok militan, dalam memobilisasi identitas untuk memperkuat dukungan terhadap perjuangan mereka. Kelompok-kelompok seperti Hizbul Mujahideen atau Jammu Kashmir Liberation Front memanfaatkan narasi identitas Muslim Kashmir untuk memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya dialog inklusif yang mengakui identitas kelompok minoritas untuk meredakan konflik (Tajfel & Turner, 1979).

Tanpa pengakuan terhadap identitas etno-religius masyarakat Kashmir, upaya penyelesaian konflik yang hanya berfokus pada aspek teritorial atau keamanan cenderung gagal. Dengan demikian, Teori Politik Identitas memberikan kerangka yang relevan untuk menganalisis dinamika konflik Kashmir, di mana mobilisasi identitas etno-religius menjadi pendorong utama perlawanan masyarakat terhadap negara. Teori ini melengkapi PSC dan Relative Deprivation dengan menyoroti bagaimana identitas kolektif dimanfaatkan secara strategis dalam konflik politik, serta pentingnya pengakuan identitas sebagai bagian dari solusi damai.

B. Teori Protracted Social Conflict (PSC) - Edward Azar

Protracted Social Conflict Theory (PSC) atau Teori Konflik Sosial Berkepanjangan dikembangkan oleh Edward Azar pada tahun 1990. Azar (1990) menjelaskan bahwa konflik yang berlangsung dalam jangka panjang di negara berkembang sering kali berakar pada kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar kolektif kelompok identitas, seperti pengakuan, keamanan, partisipasi politik, dan otonomi budaya. Dalam sengketa perbatasan wilayah Kashmir, konflik ini tidak hanya menyangkut sengketa teritorial, tetapi juga mencerminkan bentuk penolakan terhadap identitas etno-religius masyarakat Muslim Kashmir oleh negara. Negara dianggap tidak menyediakan ruang yang memadai untuk mengekspresikan identitas kultural dan keagamaan komunitas tersebut, yang pada akhirnya mendorong perlawanan dan memperpanjang konflik. Ketika negara tidak mampu mengakui identitas etno-religius suatu kelompok dan mendistribusikan sumber daya serta kekuasaan secara adil, ketegangan menjadi sulit dihindari dan konflik pun terus berlanjut (Ganguly, 1997).

Azar juga menyoroti sejumlah faktor yang memperburuk konflik, seperti intervensi pihak ketiga, ketidakstabilan politik, dan ketidakadilan sosial. Dalam kasus Kashmir, intervensi militer dan kebijakan pemerintah yang represif terhadap gerakan prokemerdekaan semakin memperdalam rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan dialog yang konstruktif dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan juga berkontribusi pada berlanjutan konflik. Teori PSC juga menyoroti pentingnya pendekatan multidimensional dalam menyelesaikan konflik (Azar, 1990). Penyelesaian yang hanya berfokus pada aspek militer atau teritorial tidak akan cukup untuk mengatasi akar penyebab konflik. Sebaliknya, diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok identitas, seperti pengakuan, partisipasi, dan otonomi (Ganguly, 1997). Dalam hal ini, menciptakan ruang bagi masyarakat Muslim Kashmir untuk mengekspresikan identitas mereka, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka menjadi langkah penting yang dapat dilakukan. Dengan demikian, teori Protracted

Social Conflict memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis dan memahami konflik berkepanjangan di Kashmir. Teori ini menekankan bahwa untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, penting untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi kelompok yang terpinggirkan, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan dialog dan rekonsiliasi.

C. Teori Relative Deprivation - Ted Robert Gurr

Teori Relative deprivation merujuk pada ketimpangan antara harapan suatu kelompok dan kenyataan sosial-politik yang dialami masyarakat. Menurut Gurr (1970), konflik kolektif dapat timbul ketika terdapat kesenjangan antara harapan kelompok dan realitas yang mereka alami. Dalam pengembangan teorinya, Gurr (1993) menekankan bahwa frustrasi kolektif tidak hanya disebabkan oleh kekurangan material, tetapi juga oleh diskriminasi simbolik, marginalisasi budaya, dan penolakan terhadap identitas sosial. Di Kashmir, perbedaan antara harapan masyarakat Muslim untuk mendapatkan pengakuan identitas, kebebasan beragama, dan keterlibatan dalam politik, dengan kenyataan yang dipenuhi oleh militerisasi dan penindasan negara, memperburuk konflik identitas yang ada. Gurr juga mengemukakan bahwa ketika kelompok merasa terancam dan terpinggirkan, mereka cenderung mengembangkan rasa solidaritas yang lebih kuat di antara anggota kelompok tersebut, yang pada gilirannya dapat memicu tindakan kolektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam konteks konflik Kashmir, tindakan protes dan gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim dapat dilihat sebagai respons terhadap perasaan terpinggirkan dan penolakan identitas yang mereka alami (Gurr, 1993). Dengan demikian, teori frustrasi kolektif Gurr memberikan kerangka yang relevan untuk memahami konflik di Kashmir, di mana harapan masyarakat Muslim yang tidak terpenuhi berkontribusi pada ketidakpuasan dan konflik berkepanjangan.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library

research) untuk menganalisis konflik identitas dalam sengketa wilayah Kashmir. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai sumber literatur guna memahami dinamika sosial-politik yang kompleks dan bersifat historis. Data yang digunakan bersumber dari literatur akademik seperti buku teori, artikel jurnal, dan studi kasus terdahulu, serta dokumen institusional dari lembaga internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, digunakan juga sumber sekunder berupa berita, laporan media kredibel, serta arsip kebijakan pemerintah India dan Pakistan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan literatur teori untuk melihat relevansi serta penerapan teori Protracted Social Conflict (Azar, 1990) dan teori Relative Deprivation (Gurr, 1970, 1993).

Lebih lanjut, analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi dan analisis tematik, yang membantu untuk mengidentifikasi pola cerita dan tema-tema penting, seperti penolakan identitas, nasionalisme mayoritas, penindasan politik, dan dinamika regional dalam konflik Kashmir. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan akar dan karakter konflik secara konseptual.

5. Pembahasan

A. Identitas Keagamaan dan Nasional Dalam Konflik Kashmir

Berdasarkan kajian dari berbagai sumber, sengketa antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir sudah terjadi sangatlah lama, jika konflik ini sudah terjadi sejak 1947 berarti sudah sekitar 7 dekade (Khoiriyah & Devi, 2024). karena menjadi konflik yang sangat panjang di Asia Selatan. Konflik ini tidak hanya mengenai perebutan wilayah semata melainkan ada hal yang lebih kompleks yaitu politik identitas, khususnya agama dan nasionalisme (Nadhirah, 2023).

Ketegangan yang terjadi di Kashmir juga dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dianggap represif oleh sebagian penduduk Kashmir. Kebijakan ini semakin memperkuat identitas kolek-

tif masyarakat Kashmir sebagai kelompok yang tertindas, sehingga mempertajam konflik identitas dan menimbulkan perlawanan di kalangan masyarakat Kashmir yang proteksi ingin merdeka dan menentukan nasibnya sendiri (Amelia, 2023).

Karena konflik yang terjadi sudah sangat lama menyebabkan krisis identitas di kalangan masyarakat Kashmir. Beberapa atau aspirasi ingin merdeka yang dilakukan masyarakat Kashmir membuat konflik lebih memanas yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan massal, kekerasan dan juga pembatasan akses informasi. Protes dan demonstrasi itu terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan represif pemerintah India. Faktor agama sangatlah menjadi faktor penting dalam konflik di wilayah Kashmir antara India dan Pakistan (Asese, 2024). Mayoritas penduduk di Jammu Kashmir adalah muslim sehingga Pakistan memanfaatkan identitas Islam untuk memperkuat klaimnya bahwa wilayah Kashmir seharusnya masuk kedalam teritorial Pakistan. Namun, India secara tegas menyatakan bahwa wilayah Kashmir adalah bagian dari negaranya terlepas dari komposisi agama mayoritas penduduk (Rosdiana, 2020).

Ketegangan ini menimbulkan krisis identitas di kalangan masyarakat kashmir sendiri yang merasa terhimpit diantara dua negara besar yang saling bersaing memperebutkan legitimasi atas identitas mereka. Konflik di wilayah Kashmir tidak hanya sekedar masalah perbatasan namun, semakin berkembang menjadi isu identitas yang sangat kuat. Di India, di bawah kepemimpinan Narendra Modi, pemerintah India semakin menguatkan narasi Nasionalisme Hindu dan menjadikan Kashmir sebagai "The Other" atau (yang berbeda) dalam pembentukan identitas India yang baru (Khalik, 2021). Sedangkan Pakistan menggunakan Identitas Islam sebagai alat untuk mencari dukungan kepada Internasional dan domestik terhadap aspirasi masyarakat Kashmir untuk memperjuangkan hak nya. Kedua negara saling bersaing untuk memperkuat identitas kolektif mereka melalui konflik ini, sehingga membuat konflik semakin runcing dan memperumit upaya penyelesaian damai. Melalui perspektif politik identitas konflik ini memperlihatkan bagaimana agama dan nasionalisme digunakan sebagai alat mobilisasi massa (Asese, 2024).

Jutaan penduduk Kashmir yang telah hidup lama dalam ketidakpastian, di bawah tekanan militer, pembatasan akses informasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius membuat Kashmir mengalami krisis kemanusiaan (Hutauruk, Rosyidin, & Paramasatya, 2022). Banyak warga sipil yang mengalami kekerasan dari pihak militer maupun kelompok bersenjata. Selain itu hasil dari konflik ini melahirkan gelombang pengungsi yang datang dari internal maupun eksternal yang semakin memperburuk situasi sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan (Ayunda & Y, 2016). Krisis kemanusiaan ini menjadi contoh nyata bahwa konflik yang di dasari oleh konflik identitas tidak hanya berdampak pada politik namun juga berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari (Amalia, 2023).

B. Konflik Kashmir dalam Perspektif Teori Politik Identitas

Konflik Kashmir merupakan salah satu sengketa wilayah paling kompleks di Asia Selatan, yang dapat dianalisis melalui teori politik identitas untuk memahami mengapa konflik ini sulit diselesaikan. Teori politik identitas menekankan bahwa identitas kolektif menjadi alat mobilisasi politik yang memperkuat polarisasi dan menghambat resolusi damai (Fearon & Laitin, 2000). Dalam konteks Kashmir, dinamika identitas tidak hanya memicu ketegangan, tetapi juga menciptakan kebuntuan struktural yang memperpanjang konflik.

Teori politik identitas menunjukkan bahwa konflik berbasis identitas cenderung berkepanjangan karena melibatkan “kredibilitas komitmen” (Fearon, 1995). Dalam kasus Kashmir, pihak-pihak yang terlibat, termasuk India, Pakistan, dan kelompok-kelompok di Kashmir, enggan berkompromi karena khawatir dianggap lemah oleh konstituen domestik mereka. Ketegangan ini diperparah oleh ketidakpercayaan yang mendalam, yang membuat upaya mediasi, seperti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948, tidak efektif. Politik identitas menciptakan narasi yang saling bertentangan, di mana setiap pihak memandang Kashmir sebagai simbol eksistensi mereka, sehingga negosiasi menjadi sulit (Horowitz, 1985).

Politik identitas juga memengaruhi aktor non-negara, seperti kelompok militan dan masyarakat

kat sipil di Kashmir. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan identitas kolektif untuk memobilisasi dukungan, sering kali melalui protes atau kekerasan, yang memicu respons militer dari pihak berwenang. Menurut Staniland (2014), siklus kekerasan ini memperdalam alienasi masyarakat lokal dan memperkuat narasi identitas yang bertentangan dengan kekuatan dominan. Pendekatan militer, seperti operasi keamanan skala besar, sering kali gagal meredakan ketegangan karena tidak mengatasi akar identitas dari konflik.

Dalam perspektif teori politik identitas, penyelesaian konflik Kashmir memerlukan pendekatan yang mengakui kompleksitas identitas kolektif tanpa memicu eskalasi lebih lanjut. Gurr (2000) menyarankan bahwa resolusi konflik berbasis identitas membutuhkan dialog inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Kashmir. Namun, ketidakpercayaan yang telah tertanam selama dekade menjadi hambatan utama. Kriesberg (2007) menegaskan bahwa dialog harus dirancang untuk mengurangi polarisasi identitas dan membangun kepercayaan, meskipun hal ini memerlukan waktu dan komitmen politik yang signifikan.

C. Agama dan Nasionalisme Sebagai Pemicu & Penguat Konflik

India dan Pakistan sedang dalam konflik atas wilayah Kashmir, yang merupakan salah satu konflik terlama dan paling kompleks di dunia kontemporer. Klaim teritorial bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan masalah ini faktor ideologis seperti nasionalisme dan agama juga berperan. Sejak India dan Pakistan terpisah pada tahun 1947, konflik di wilayah Jammu dan Kashmir telah mencerminkan perbedaan pendapat politik di dua negara tersebut. Pakistan, negara Islam, mengklaim Kashmir karena kesamaan agama karena mayoritas penduduknya Muslim. India, sebuah negara multikultural sekuler, mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial.

Menurut Zubair, Naeem, dan Fatima (2022), agama telah dijadikan alat legitimasi oleh Pakistan dalam memperkuat klaimnya atas Kashmir. Identitas keagamaan masyarakat Kashmir tidak hanya digunakan sebagai argumen politik, tetapi

juga sebagai sarana mobilisasi dukungan domestik dan internasional. Pakistan mengemas konflik ini sebagai bagian dari perjuangan umat Islam melawan penjajahan dan penindasan. Dengan menggunakan simbol-simbol Islam, Pakistan berupaya membangun narasi bahwa Kashmir seharusnya menjadi bagian dari wilayahnya karena persamaan keyakinan. Narasi ini diperkuat dengan dukungan dari kelompok Islamis di wilayah tersebut, termasuk gerakan-gerakan separatis yang mengangkat panji agama dalam perjuangannya.

Sebaliknya, India menolak pendekatan yang berbasis agama dan menganggap integrasi Kashmir sebagai bagian penting dari upaya nasionalisme sipil yang menekankan kesatuan dalam keragaman. Pemerintah India menganggap gerakan separatis yang berbasis identitas keagamaan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan prinsip sekularisme. Di mata India, mempertahankan Kashmir bukan hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga menunjukkan bahwa negara sekuler dapat menerima berbagai etnis dan agama dalam kerangka politik yang konsisten.

Situasi ini membuat nasionalisme di kedua negara berkembang sebagai narasi yang saling bertolak belakang dan saling menegasikan. Nasionalisme India berakar pada ide tentang persatuan nasional yang melampaui identitas agama, sedangkan nasionalisme Pakistan cenderung memperkuat identitas Islam sebagai basis legitimasi negara. Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Sreevatsa (2022), “nasionalisme dan agama saling menyatu dalam konflik ini, menciptakan ketegangan ideologis yang mengakar dan sulit diselesaikan melalui negosiasi konvensional.” Ketegangan ini menjelma menjadi polarisasi identitas yang tidak hanya terjadi di tingkat elite, tetapi juga meresap ke dalam masyarakat di kedua negara.

Nasionalisme dan agama merupakan simbol ideologis yang kuat sekaligus alat politik yang efektif dalam konteks konflik Kashmir. Di Pakistan, narasi dukungan terhadap Kashmir sering dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas Islam dan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu domestik, seperti ketidakstabilan ekonomi atau politik (Ahmed, 2017). Sementara itu, di India, retorika nasionalisme digunakan untuk mendukung agenda partai politik yang berkuasa,

terutama saat ketegangan meningkat di wilayah perbatasan atau terjadi serangan yang dikaitkan dengan kelompok separatis Kashmir (Bose, 2021). Kedua negara memanfaatkan narasi ideologis ini untuk memperkuat dukungan politik dan memobilisasi basis massa mereka.

Agama dan nasionalisme bukan hanya menyebabkan perselisihan, tetapi juga memperpanjang dan memperdalamnya. Setiap peristiwa yang melibatkan kekerasan, invasi militer, atau tindakan represif hanya memperkuat narasi yang sudah ada. Selain itu, konflik Kashmir telah berkembang menjadi konflik ideologis yang sulit diselesaikan hanya melalui diplomasi atau perjanjian damai konvensional karena menyentuh elemen penting dari identitas nasional kedua negara. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian konflik memerlukan rekonstruksi narasi yang lebih inklusif dan percakapan lintas identitas yang sungguh-sungguh. Konflik Kashmir akan tetap menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas Asia Selatan jika tidak ada upaya untuk meredam penggunaan agama dan nasionalisme sebagai alat politik.

D. Dampak Konflik Identitas Terhadap Stabilitas Kawasan Asia Selatan

Dampak konflik identitas di Kashmir tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara India dan Pakistan, tetapi juga memengaruhi stabilitas di kawasan Asia Selatan. Kedua negara, yang keduanya memiliki senjata nuklir, terus memperkuat kekuatan militer mereka, meningkatkan risiko konflik terbuka. Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, 2023), India dan Pakistan masing-masing mengalokasikan sekitar 2,8% dan 4,0% dari PDB mereka untuk belanja militer pada 2022, dengan fokus pada modernisasi senjata nuklir dan konvensional. Upaya perdamaian dan mediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 47 tahun 1948, belum menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, politik identitas yang terus dipelihara oleh kedua belah pihak semakin memperburuk situasi, menghambat upaya damai karena perbedaan kepentingan yang mendalam. Sengketa Kashmir menjadi simbol “perang sebangsa beda agama” yang terus berlangsung dan menjadi ujian bagi

perdamaian di Asia Selatan (Khairunnisa, 2021). Konflik ini juga memengaruhi dinamika regional, dengan keterlibatan tidak langsung China melalui China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) dan Bangladesh melalui dukungan diplomatik, yang menambah kompleksitas kepentingan strategis (Malik, 2022).

Konflik antara India dan Pakistan tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan Asia Selatan, tetapi juga memiliki implikasi global, termasuk bagi Indonesia. India dan Pakistan merupakan mitra dagang penting dalam sektor energi, pertanian, dan manufaktur. Ketegangan di Kashmir dapat mengganggu rantai pasokan global, seperti ekspor minyak sawit Indonesia yang mencapai 2,1 juta ton ke India pada 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketegangan ini juga memicu volatilitas harga komoditas, dengan harga batu bara global naik 12% selama eskalasi 2019 (World Bank, 2020). Hal ini berpotensi menurunkan permintaan ekspor Indonesia dan memicu inflasi serta ketidakpastian di pasar global. Selain itu, eskalasi konflik dapat mendorong penarikan investasi asing dari kawasan Asia Selatan, yang berdampak pada ekonomi negara berkembang seperti Indonesia (Chalil & Barus, 2018).

Kedua negara, India dan Pakistan, memiliki senjata nuklir, sehingga setiap eskalasi konflik memicu krisis keamanan serius. Karena saling tidak percaya, keduanya terus meningkatkan kekuatan militer, baik konvensional maupun nuklir, menjadikan Asia Selatan salah satu kawasan paling berbahaya di dunia. Laporan Federation of American Scientists (2023) memperkirakan bahwa India memiliki sekitar 164 hulu ledak nuklir dan Pakistan sekitar 170, meningkatkan risiko perang nuklir. Konflik ini juga memicu persaingan antara kekuatan besar seperti China, yang mendukung Pakistan melalui CPEC, dan Amerika Serikat, yang mempertahankan aliansi strategis dengan India (Panda, 2023). Oleh karena itu, konflik Kashmir bukan hanya isu regional, tetapi juga titik rawan keamanan global.

Dari perspektif ekonomi, konflik di Kashmir berdampak pada biaya logistik dan inflasi di kawasan. Gangguan pada jalur perdagangan penting, seperti pelabuhan Karachi dan proyek CPEC, menaikkan harga bahan baku hingga 15% selama eskalasi 2019 (Asian Development

Bank, 2020). Ketidakstabilan politik juga memicu volatilitas di pasar keuangan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Konflik Kashmir, yang telah berlangsung selama tujuh dekade, menyebabkan bentrokan berulang di perbatasan, munculnya kelompok militan, dan aksi saling balas militer. Misalnya, pada 2016, pembunuhan pemimpin militan Burhan Wani memicu protes besar yang menewaskan lebih dari 90 orang (Human Rights Watch, 2017). Pada 2019, serangan bom bunuh diri di Pulwama yang menewaskan 40 personel CRPF memprovokasi serangan udara India ke Pakistan, diikuti oleh penembakan pesawat tempur India oleh Pakistan (BBC News, 2019). Situasi ini menciptakan ketidakamanan di kawasan dan memicu konflik tambahan.

Kawasan Asia Selatan dikatakan sulit maju dan rawan konflik, salah satunya karena sengketa Kashmir. Konflik ini menghambat kerja sama regional melalui South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), dengan India dan Pakistan sering memveto keputusan penting. Data SAARC Secretariat (2022) menunjukkan bahwa perdagangan intra-regional hanya mencapai 5% dari total perdagangan anggota SAARC, jauh di bawah ASEAN yang mencapai 25%. Hal ini menghambat kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan di Asia Selatan.

E. Konflik Kashmir dari Perspektif Teori PSC dan Teori Relative Deprivation

Konflik Kashmir merupakan salah satu konflik paling kompleks dan berkepanjangan di Asia Selatan, melibatkan India, Pakistan, dan komunitas Kashmir. Konflik ini tidak hanya berakar pada sengketa wilayah, tetapi juga diperkuat oleh ketegangan identitas berbasis agama dan nasionalisme. Untuk memahami akar dan dinamika konflik ini secara lebih mendalam, analisis dapat dilakukan menggunakan dua teori utama, yakni Protracted Social Conflict (PSC) dari Edward Azar dan Relative Deprivation dari Ted Robert Gurr. Teori PSC menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan disebabkan oleh kombinasi dari deprivasi kebutuhan dasar, kegagalan tata kelola, konflik identitas kelompok, dan keterlibatan aktor eksternal. Sementara itu, teori

Relative Deprivation menyoroti bahwa kesenjangan antara harapan kelompok dan realitas yang mereka alami menciptakan frustrasi kolektif yang dapat berujung pada kekerasan.

Dalam konteks Kashmir, identitas agama menjadi pemicu utama konflik. Mayoritas penduduk Muslim di Jammu dan Kashmir merasa semakin terasing dalam sistem politik India, terutama sejak munculnya kebijakan nasionalisme Hindu yang dipromosikan oleh Partai Bharatiya Janata Party (BJP). Salah satu titik balik signifikan terjadi pada tahun 2019, saat pemerintah India mencabut Pasal 370 Konstitusi, yang sebelumnya memberikan status otonomi khusus bagi Jammu dan Kashmir. Pencabutan ini memicu protes besar-besaran dan peningkatan kekerasan sebesar 22% pada tahun berikutnya, dengan 279 insiden terorisme tercatat sepanjang 2020 (South Asia Terrorism Portal, 2021). Di sisi lain, Pakistan terus memanfaatkan narasi solidaritas Islam untuk membangun dukungan domestik terhadap isu Kashmir. Sebanyak 68% warga Pakistan menyatakan dukungan kuat terhadap perjuangan rakyat Kashmir, dan isu ini kerap digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah domestik di Pakistan itu sendiri, misalnya seperti inflasi yang mencapai 29,2% pada tahun 2023 (Gallup Pakistan, 2022; Trading Economics, 2023).

Faktor deprivasi kebutuhan dasar juga sangat mencolok. Tingkat pengangguran di Jammu dan Kashmir mencapai 21,4% pada tahun 2020, jauh di atas rata-rata nasional India sebesar 7,1% (Centre for Monitoring Indian Economy, 2021). Akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga tertinggal; hanya 58% anak usia sekolah mendapatkan pendidikan berkualitas dan hanya terdapat 0,3 dokter per 1.000 penduduk, dibandingkan dengan rata-rata nasional India 0,7 (UNICEF India, 2023; World Health Organization, 2022). Minimnya investasi pusat terlihat dari alokasi anggaran hanya sebesar 12% untuk wilayah tersebut pada 2022 (Government of India, 2022). Kondisi ini memperparah perasaan frustrasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, yang kemudian menjadi target perekrutan kelompok militan seperti Hizbul Mujahideen.

Kegagalan tata kelola juga menjadi faktor kunci dalam berlarutnya konflik. Selain penca-

butan otonomi, penindasan politik menjadi bagian dari pendekatan keamanan India. Lebih dari 2.000 warga Kashmir ditahan tanpa dakwaan berdasarkan Public Safety Act selama tahun 2020 (Amnesty International, 2021), dan tokoh politik seperti Mehbooba Mufti ditahan lebih dari setahun tanpa pengadilan (The Guardian, 2020). Di tingkat internasional, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 47 tahun 1948 yang menyerukan pelaksanaan plebisit gagal dijalankan karena veto dan tarik-menarik antara India dan Pakistan (United Nations, 1948). Kegagalan ini menunjukkan kebuntuan institusi internasional dalam menyelesaikan konflik tersebut secara adil dan efektif.

Konflik ini juga diperumit oleh keterlibatan aktor eksternal. China, melalui proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), menginvestasikan lebih dari \$62 miliar, termasuk infrastruktur di wilayah Gilgit-Baltistan yang diklaim India (Malik, 2022). Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai mitra strategis India memberikan bantuan militer senilai \$3,5 miliar pada 2022 (U.S. Department of State, 2022). Dukungan dari Turki dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam bentuk pernyataan politik turut memperkeruh situasi (Al Jazeera, 2023). Keterlibatan aktor eksternal memperpanjang konflik dengan menjadikannya bagian dari arena persaingan geopolitik regional dan global.

Teori Relative Deprivation memperjelas akar kekerasan sebagai akibat dari kesenjangan antara ekspektasi dan realitas. Masyarakat Kashmir berharap pada pemenuhan janji otonomi politik sebagaimana tercantum dalam Resolusi PBB No. 47, tetapi yang mereka alami justru pengetatan kontrol militer, pelanggaran HAM, dan keterbatasan hak-hak sipil. Kekecewaan ini terlihat nyata dalam demonstrasi massal, seperti yang terjadi setelah pembunuhan Burhan Wani pada 2016, yang menewaskan lebih dari 90 orang dan melukai lebih dari 15.000 (Human Rights Watch, 2017). Rasa frustrasi tersebut juga melahirkan kekerasan ekstrem, seperti serangan militan di Pulwama tahun 2019 yang menewaskan 40 personel India dan memicu eskalasi militer lintas batas (BBC News, 2019). Menurut International Crisis Group, lebih dari 3.000 militan lintas batas aktif pada 2019, sebagian besar termotivasi oleh ketidakadilan struk-

tural dan ideologi jihad (International Crisis Group, 2020).

Politik identitas semakin memperkuat rasa frustrasi kolektif. Di India, retorika nasionalisme Hindu menciptakan alienasi terhadap Muslim Kashmir, dengan 62% warga Kashmir mengaku mengalami diskriminasi berbasis agama (Kashmir Observer, 2020). Di Pakistan, narasi jihad dan simbolisasi perjuangan Kashmir dipakai untuk menggalang dukungan domestik maupun internasional. Sementara itu, kebijakan keamanan India seperti Operasi All-Out menyebabkan lebih dari 1.200 warga sipil tewas antara 2016 dan 2020 (Amnesty International, 2021), dan pembatasan internet selama 552 hari antara Agustus 2019 hingga Februari 2021 menimbulkan kerugian ekonomi hingga \$2,4 miliar (Kashmir Chamber of Commerce, 2021).

Dampak dari konflik ini meluas ke tingkat regional dan global. Ketegangan antara India dan Pakistan menghambat efektivitas organisasi kawasan seperti South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), dengan perdagangan intra-regional hanya 5%, jauh di bawah ASEAN yang mencapai 25% (SAARC Secretariat, 2022). Veto berulang dari kedua negara membuat kerja sama multilateral menjadi stagnan. Konflik juga membawa risiko serius dalam bidang keamanan global, mengingat keduanya adalah negara pemilik senjata nuklir, masing-masing dengan 164 (India) dan 170 (Pakistan) hulu ledak (Federation of American Scientists, 2023). Secara ekonomi, konflik memicu gangguan terhadap rantai pasokan dan perdagangan internasional. Eskalasi 2019 menyebabkan kenaikan harga batu bara global sebesar 12% (World Bank, 2020), memengaruhi negara berkembang seperti Indonesia yang tergantung pada impor energi. Ekspor minyak sawit Indonesia ke India sebesar 2,1 juta ton pada 2023 turut terdampak ketegangan bilateral (Badan Pusat Statistik, 2024). Jalur perdagangan utama seperti pelabuhan Karachi dan proyek CPEC mengalami gangguan, menaikkan harga bahan baku hingga 15% pada 2019 (Asian Development Bank, 2020).

Dengan demikian, kombinasi antara teori PSC dan Relative Deprivation menunjukkan bahwa konflik Kashmir tidak hanya merupakan persoalan teritorial, tetapi konflik struktural yang berakar pada ketidakadilan ekonomi,

politik identitas, dan kegagalan institusi lokal maupun internasional. Solusi jangka panjang perlu mencakup upaya komprehensif, seperti peningkatan akses pendidikan dan lapangan kerja di wilayah Kashmir untuk mengurangi deprivasi ekonomi, serta reformasi kebijakan untuk mengakhiri marginalisasi identitas. Dialog inklusif antar komunitas dan negara, yang dimediasi oleh aktor netral seperti Norwegia atau Swiss, dapat membantu meredam dampak politik identitas dan mengurangi campur tangan aktor eksternal yang bersifat kompetitif. Hanya melalui pendekatan multilevel yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan geopolitik, perdamaian berkelanjutan di Asia Selatan dapat dicapai.

6. Kesimpulan

Konflik Kashmir bukan hanya soal perebutan wilayah antara India dan Pakistan, melainkan menunjukkan konflik identitas yang lebih dalam, yang menyangkut agama, nasionalisme, dan pengakuan terhadap eksistensi komunitas. Sengketa yang telah berlangsung sejak 1947 ini tidak hanya memperlihatkan ketegangan geopolitik, tetapi juga menunjukkan bagaimana identitas kolektif masyarakat, terutama komunitas Muslim di Kashmir, dimobilisasi untuk memperjuangkan hak dan pengakuan politik mereka.

Kebijakan India yang mencabut otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir pada tahun 2019 justru memperkuat perasaan terpinggirkan di kalangan masyarakat lokal, memicu perlawanan yang didasarkan pada identitas keagamaan dan nasionalisme. Di sisi lain, Pakistan memanfaatkan kesamaan agama untuk memperkuat klaimnya terhadap wilayah tersebut, yang pada akhirnya memperbesar polarisasi antara kedua negara. Pendekatan kekerasan, militerisasi, dan penolakan terhadap dialog inklusif hanya memperpanjang penderitaan warga sipil dan menghambat solusi damai. Konflik ini telah menimbulkan pelanggaran HAM, krisis kemanusiaan, serta ketegangan di kawasan Asia Selatan yang meluas hingga berdampak pada stabilitas regional dan ekonomi global.

Melalui perspektif politik identitas, terlihat bahwa solusi jangka panjang terhadap konflik

Kashmir membutuhkan pengakuan terhadap identitas masyarakat lokal, pembukaan ruang dialog yang setara, dan keterlibatan aktor-aktor dari kedua belah pihak secara terbuka dan jujur. Tanpa langkah-langkah tersebut, konflik Kashmir akan tetap menjadi konflik sejarah yang belum terselesaikan dan terus menjadi sumber ketegangan yang membahayakan stabilitas kawasan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, R., Palupi, D. A., & Syofian, S. (2020). Penyelesaian sengketa di wilayah Kashmir antara India dan Pakistan dari perspektif hukum internasional.
- Ahmed, I. (2017). Pakistan's national identity, Kashmir, and the politics of Islam. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 40(2), 345–362. <https://doi.org/10.1080/00856401.2017.1299441>
- Akbar, I. (2024). Konflik India–Pakistan: Implikasinya terhadap keamanan di wilayah Kashmir melalui perspektif neorealisme. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(3).
- Al Jazeera. (2023, March 10). Turkey, OIC slam India's Kashmir policies at UN meeting. <https://www.aljazeera.com/news/2023/3/10/turkey-oic-slam-indiakashmir-policies>
- Alhayyan, R. (2013). Sengketa perbatasan wilayah Kashmir dalam perspektif hukum internasional. *Neliti*.
- Amalia, N. p. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sengketa Wilayah Kashmir. *Global Political Studies Journal*, Vol. 7 No. 1. Amnesty International. (2021). India: Human rights abuses in Jammu and Kashmir. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa20/3666/2021/en/>
- Anwar, A. (2021). Respon Pakistan terhadap pencabutan status otonomi khusus Kashmir oleh India tahun 2019. *International Journal of Islamic Studies (IJIS)*.
- Arsyada, M. M. (2023). Analisis kebutuhan sumber daya air di Pakistan dalam menghadapi ledakan penduduk.
- Asese, D. (2024). konflik India-Pakistan: Mengulik Konflik Agama dalam Konstelasi Kenegaraan. *MUSHAF Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4 No. 2. Asian Development Bank. (2020). Asian development outlook 2020: What drives innovation in Asia? <https://www.adb.org/publications/asian-developmentoutlook-2020>
- Ayunda, M. K., & Y, R. D. (2016). Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947–1970). *Risalah: Jurnal Ilmu Sejarah*.
- Azar, E. E. (1990). The management of protracted social conflict: Theory and cases. Dartmouth Publishing Company.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik perdagangan luar negeri Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id/publication/2024/statistik-perdagangan-luar-negeri2023>
- BBC News. (2019, February 14). Pulwama attack: India retaliates with airstrikes in Pakistan. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47245269>
- BBC News. (2019, February 27). India-Pakistan: Military escalation in Kashmir. <https://www.bbc.com/news/world-asia-47366718>
- Bose, S. (2003). Kashmir: Roots of conflict, paths to peace. Harvard University Press.
- Bose, S. (2021). Kashmir at the crossroads: Inside a 21st-century conflict. Yale University Press.
- Census of India. (2011). Jammu and Kashmir population data. <https://censusindia.gov.in>
- Centre for Monitoring Indian Economy. (2021). Unemployment in India: A statistical profile. <https://www.cmie.com>
- Centre for Monitoring Indian Economy. (2021). Unemployment in India: State-wise analysis 2020. <https://www.cmie.com>
- Chalil, D., & Barus, R. (2018). The Sustainability of Indonesia-Pakistan Palm Oil Supply Chain. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, Vol. 15 No. 2.
- Chalil, T., & Barus, R. (2018). Dampak konflik India-Pakistan terhadap perdagangan global. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 12(3), 45–60.
- Chatterjee, P. (1993). The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories. Princeton University Press.
- Fajrin, A. F., Tamaela, M. D., & Siswatinigrum, E. (2024). Geopolitik perbatasan Kashmir: Studi kasus pengaruh konflik India–Pakistan terhadap keamanan global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar (JIHIF)*.
- Fauzi, S., Sari, S., & Rachmat, R. (2020). Sekuritisasi isu separatisme oleh India sebagai justifikasi pencabutan otonomi Kashmir. *Palito*.
- Fearon, J. D. (1995). Rationalist explanations for war. *International Organization*, 49(3), 379–414. <https://doi.org/10.1017/S0020818300033324>
- Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2000). Violence and the social construction of ethnic identity. *International Organization*, 54(4), 845–877. <https://doi.org/10.1162/002081800551398>

27. Federation of American Scientists. (2023). Status of world nuclear forces. <https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/>
28. Firmanty, C. I. (2010). Nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990.
29. Gallup Pakistan. (2022). Public opinion on Kashmir issue. <https://gallup.com.pk/surveys/2022-kashmir>
30. Gallup Pakistan. (2022). Public opinion on Kashmir: Survey results 2022. <https://gallup.com.pk/surveys/kashmir-opinion-2022>
31. Ganguly, S. (1997). The crisis in Kashmir: Portents of war, hopes of peace. Woodrow Wilson Center Press.
32. Government of India. (2022). Budget allocation for Jammu and Kashmir 2022. <https://www.indiabudget.gov.in>
33. Gurr, T. R. (1970). Why men rebel. Princeton University Press.
34. Gurr, T. R. (1993). Minorities at risk: A global view of ethno-political conflicts. United States Institute of Peace Press.
35. Gurr, T. R. (2000). Peoples versus states: Minorities at risk in the new century. United States Institute of Peace Press.
36. Horowitz, D. L. (1985). Ethnic groups in conflict. University of California Press.
37. Human Rights Watch. (2017). India: End excessive force in Kashmir protests. <https://www.hrw.org/news/2017/07/12/india-end-excessive-force-kashmirprotests>
38. Human Rights Watch. (2017). Kashmir: Civilians killed in 2016 protests. <https://www.hrw.org/news/2017/01/12/kashmir-civilian-deaths-2016>
39. Human Rights Watch. (2020). India: Abuses in Kashmir after Article 370 revocation. <https://www.hrw.org/news/2020/08/05/india-kashmir-abuses>
40. Hutaeruk, I. F., Rosyidin, M., & Paramasatya, d. S. (2022). Pelanggaran HAM di Kashmir sebagai Dampak dari Sengketa Wilayah India-Pakistan. *Journal of International Relations Diponegoro*, Vol. 8 No. 3.
41. International Crisis Group. (2020). Kashmir: Militancy and cross-border dynamics. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir>
42. International Crisis Group. (2020). Raising the stakes in Jammu and Kashmir. Asia Report No. 310. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/310-raising-stakes-jammu-and-kashmir>
43. Kashmir Chamber of Commerce. (2021). Economic impact of internet shutdowns in Kashmir. <https://kashmirchamber.org/reports/2021>
44. Kashmir Observer. (2020). Survey: Public sentiment on Article 370 revocation. <https://kashmirobsrver.net/2020/08/survey-article-370>
45. Khairunnisa, A. (2021). Politik identitas dalam konflik Kashmir: Perspektif nasionalisme dan agama. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2), 123–140.
46. Khairunnisa, B. W. (2021). Resolusi Konflik Pakistan dan India dalam Perebutan Wilayah Kashmir. *Widya Sosiopolitika*.
47. Khalik, P. (2021). Pengaruh Nilai Hindutva dalam Kebijakan Luar Negeri India terhadap Status Kashmir Era Kepemimpinan Narendra. skripsi.
48. Khoiriyah, U. M., & Devi, N. A. (2024). Upaya Diplomasi Koersif India dalam Konflik Sengketa Wilayah Kashmir Tahun 2012–2018. *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6 No. 1.
49. Klandermans, B. (2014). Identity politics and politicized identities: Identity processes and the dynamics of protest. *Political Psychology*, 35(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/pops.12167>
50. Kriesberg, L. (2007). Constructive conflicts: From escalation to resolution (3rd ed.). Rowman & Littlefield.
51. Malik, A. (2022). China's strategic investments in Pakistan: CPEC and beyond. *Journal of Strategic Studies*, 45(3), 321–345.
52. Malik, A. R. (2022). China's strategic interests in South Asia: The case of CPEC. *Asian Survey*, 62(4), 567–589. <https://doi.org/10.1525/as.2022.62.4.567>
53. Nadhirah, H. (2023). Kashmir dan Proyek Keindiaan Modi: Dari Isu Perbatasan Menjadi Isu Identitas. skripsi.
54. Panda, A. (2023). The United States and India: A strategic partnership in South Asia. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2023/06/the-united-states-and-india-astrategic-partnership-in-south-asia/>
55. Putri, A. A. (2020). Analisis pencabutan pemberlakuan otonomi khusus Kashmir dan Jammu oleh pemerintah India. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISH)*.
56. Resen, M. (2024). National ideologies and the Kashmir conflict. *World Politics Review*.
57. Rizki, K., & Muquita, N. R. (2023). Analisis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam sengketa wilayah Kashmir.
58. Rosdiana, N. I. (2020). Analisis pencabutan pemberlakuan otonomi khusus Kashmir dan Jammu oleh pemerintah India. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISH)*.
59. SAARC Secretariat. (2022). SAARC annual report 2022. <https://www.saarcsec.org/annual-report-2022>

60. South Asia Terrorism Portal. (2021). Jammu & Kashmir data sheets: Annual fatalities in terrorist violence, 2000–2021. <https://www.satp.org/datasheet-terroristattack/fatalities/india-jammukashmir>
61. South Asia Terrorism Portal. (2021). Kashmir violence statistics 2020. <https://www.satp.org>
62. Sreevatsa, K. V. (2022). National Identity and War: The Case of India and Pakistan. *European Journal of Social Science Studies*.
63. Staniland, P. (2014). *Networks of rebellion: Explaining insurgent cohesion and collapse*. Cornell University Press.
64. Stockholm International Peace Research Institute. (2023). SIPRI yearbook 2023: Armaments, disarmament and international security. <https://www.sipri.org/yearbook/2023>
65. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
66. The Guardian. (2020, October 15). Mehbooba Mufti released after 14 months of detention. <https://www.theguardian.com/world/2020/oct/15/mehbooba-muftireleased-kashmir>
67. Trading Economics. (2023). Pakistan inflation rate 2023. <https://tradingeconomics.com/pakistan/inflation-cpi>
68. Trading Economics. (2023). Pakistan inflation rate. <https://tradingeconomics.com/pakistan/inflation-cpi>
69. U.S. Department of State. (2022). U.S. military assistance to India 2022. <https://www.state.gov/military-assistance-india>
70. UNICEF India. (2023). Education access in Jammu and Kashmir. <https://www.unicef.org/india/reports/2023-education>
71. United Nations. (1948). Resolution 47: The India-Pakistan question. <https://www.un.org/documents/res47>
72. World Bank. (2020). *Commodity markets outlook: Implications of India-Pakistan tensions*. <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>
73. World Health Organization. (2022). *Health infrastructure in India*. <https://www.who.int/india/health-infrastructure>
74. Zubair, R., Naeem, M., & Fatima, H. (2022). Kashmir Conflict: An Analysis of EthnoReligious Perspective. *International Journal of Contemporary Issues in Social Sciences*